

BAB 2

Alam dan Penduduk Kepulauan Togean

2.1. Menuju Kepulauan Togean

Kepulauan Togean terletak di tengah teluk Tomini, dalam posisi melintang dari barat ke arah timur. Ke sebelah selatan dan barat, terpisah dengan lautan dalam, kepulauan Togean berbatasan dengan daratan pulau Sulawesi. Sedangkan ke utara, kepulauan Togean berbatasan dengan daratan pulau Sulawesi yang menjadi wilayah propinsi Gorontalo. Luas keseluruhan wilayah daratan kepulauan Togean kurang lebih 755,4 km² atau sekitar 75.000 ha. Wujud spasial kepulauan Togean merupakan rangkaian 7 pulau utama yang memanjang dari barat ke timur, yaitu pulau Batudaka, Togean, Talatakoh, Una una, Malenge, Walea Kodi, dan Walea Bahi. Pulau-pulau tersebut dikelilingi oleh beberapa pulau yang lebih kecil, serta puluhan pulau karang (*islets*) tak berpenghuni yang lebih menyerupai batu menyembul dari dalam laut.

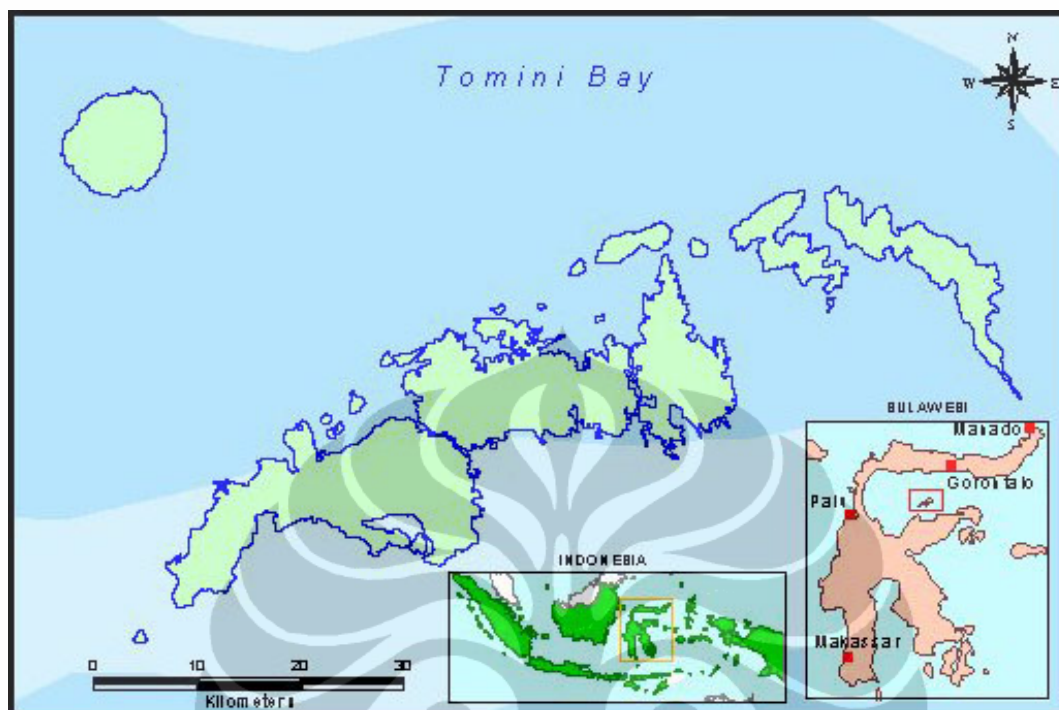
Di sebelah barat laut, pulau Una una terpisah agak jauh dari kumpulan pulau-pulau lainnya. Di sini terdapat gunung api Colo yang menjulang setinggi kurang lebih 500 meter. Sejak terakhir kali gunung Colo meletus tahun 1983, pemerintah kabupaten Poso saat itu menetapkan pulau Una una sebagai daerah rawan bencana yang tertutup untuk pemukiman penduduk. Seluruh desa yang ada di sana dipindahkan ke desa-desa baru yang dibangun di pulau Batudaka dan pulau Togean. Meski status tersebut belum dicabut, penduduk desa-desa yang dulu menetap di sana masih mengunjungi pulau tersebut untuk mengolah kebun-kebun kelapa mereka. Bahkan, dalam 15 tahun terakhir, sebagian dari penduduk asal Una una juga telah menempati kembali rumah-rumah mereka yang ditinggalkan. Setiap hari kapal-kapal motor berkapasitas hilir mudik mengangkut penumpang, hasil bumi, dan barang-barang kebutuhan lainnya antara pulau Una una dengan pelabuhan-pelabuhan lain, seperti Ampana, Wakai, Bomba, Kulinkinari dan Lebiti. Bahkan *speedboat* milik beberapa *diving resort* kadang mengantar sekelompok turis asing yang berminat menyelam di areal terumbu karang di sekeliling pulau Una una. Di pulau ini juga masih terlihat bekas aliran lahar yang membeku, bangunan mesjid tertua di kepulauan Togean, serta rumah-

rumah penduduk yang masih kosong. Namun, aktivitas berkebun, berdagang, dan mencari hasil laut sudah dilakukan kembali oleh penduduk di sana.

Kepulauan Togean termasuk ke dalam wilayah administratif pemerintahan kabupaten Tojo Una Una (Touna), sebagai hasil pemekaran kabupaten Poso pada tahun 2003. Ampana merupakan ibukota kabupaten yang sekaligus pula menjadi kota pelabuhan terdekat dengan kepulauan Togean. Dari Palu, ibukota propinsi Sulawesi Tengah, Ampana dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh lebih dari 400 kilometer melintasi kota Poso yang antara tahun 2000 hingga 2002 dilanda konflik. Jarak antara kota Ampana dengan pelabuhan Wakai, kota kecamatan dan pelabuhan di Togean yang terdekat dengan Ampana, kurang lebih 25 kilometer. Kedua kota ini hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut selama kurang lebih 3 hingga 4 jam lamanya menggunakan kapal motor (KM), atau sekitar 1,5 hingga 2 jam jika menggunakan *speedboat* atau perahu tempel berkekuatan 100 PK.

Penduduk kepulauan Togean yang bermukim di bagian barat dan tengah kepulauan, seperti di pulau Togean (termasuk orang-orang Bobongko di Teluk Kilat), Una una, Batudaka, Melenge, dan sebagian Talatakoh lebih sering berhubungan dengan penduduk di kota Ampana untuk aktivitas-aktivitas di luar urusan dengan pemerintah kabupaten. Namun, banyak penduduk kepulauan Togean yang berada di wilayah timur, seperti di pulau Walea Bahi dan Walea Kodi, serta bagian selatan pulau Talatakoh (termasuk desa Kabalutan) yang berhubungan dengan penduduk di Gorontalo dan kota-kota yang masuk wilayah kabupaten Banggai, seperti Bunta dan Pagimana. Ini disebabkan jarak antara Gorontalo, Bunta atau Pagimana dengan tempat tinggal mereka dianggap lebih dekat dibandingkan ke Ampana. Dua kali dalam seminggu kapal feri milik PT. PELNI dan sebuah KM. Puspita milik swasta melayari jalur Ampana-Gorontalo. Keduanya singgah di pelabuhan-pelabuhan tertentu di kepulauan Togean, seperti Wakai, Katupat, Malenge, Dolong, dan Pasokan. Selain penduduk setempat, para *backpacker*, wisatawan yang tidak terikat oleh agen perjalanan wisata, juga menggunakan kapal-kapal tersebut. Para wisatawan ini berdatangan untuk menikmati pemandangan bawah laut dan pantai-pantai berpasir di kepulauan Togean.

Gambar 1.1. Peta Kepulauan Togeian



Sumber: Conservation International Indonesia

2.2. Mendefinisikan ‘Alam’ Kepulauan Togeian

Hutan yang didominasi pohon jenis krikis dan palapi merupakan pemandangan yang tampak mencolok di wilayah daratan kepulauan Togeian yang berbukit dan terjal. Hutan dataran rendah (*low-land forest*) menutupi sebagian wilayah daratan kepulauan Togeian. Komposisi antara hutan dan lautan di kepulauan Togeian ini dianggap unik akibat letak kepulauan ini di Garis Wallacea, sehingga berpengaruh pada keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Penelitian oleh Yayasan Bina Sain Hayati Indonesia (YABSHI) tahun 1998 di Pulau Malenge mencatat ada 163 jenis pohon, spesies fauna endemik seperti monyet Togeian (*Macaca togeanus*), biawak Togeian (*Veranus salvator togeanus*), babirusa (*Babyrousa babirussa*), serta beberapa fauna yang terdaftar sebagai satwa yang dilindungi dalam peraturan pemerintah, seperti tangkasi (*Tarsius* sp), ketam kenari (*Birgus latro*), kuskus (*Phalanger ursinus*), dan rusa (*Cervus timorensis*).

YABSHI juga mencatat sekitar 90 jenis burung termasuk diantaranya yang dilindungi (*protected*), yaitu julang Sulawesi atau alo (*Rhytiseros cassidix*) dan

elang bondol (*Heliatus indus*) (Pramono dan Hutabarat, 1997). Pada perkembangannya, keberadaan fauna-fauna endemik dan ‘terancam punah’ inilah yang mendorong YABSHI dan CII memulai proyek-proyek konservasi mereka di kepulauan Togean. Kegiatan konservasi ini juga telah membangun identitas bagi kepulauan Togean sebagai tempat yang sangat penting dalam konteks keanekaragaman hayati, sekaligus menarik garis-garis penghubung antara alam dan penduduk kepulauan ini dengan kepentingan-kepentingan di dalam wilayah Sulawesi Tengah, Indonesia bahkan internasional.¹

Groves (1980) dalam Alastair (1993) juga memasukan babirusa di Kepulauan Togean ke dalam sub-spesies tersendiri yaitu *Babyrousa babirussa togeanensis* karena sebarannya hanya ada di kepulauan Togean. Bagi penduduk di kepulauan Togean, babirusa adalah hama bagi tanaman di kebun-kebun mereka. Babirusa telah berinteraksi dengan penduduk jauh sebelum para peneliti fauna berdatangan di kepulauan Togean. Penduduk di kepulauan Togean juga menyebutnya dengan ‘babirusa’, kecuali orang suku Bobongko yang menyebutnya dengan nama *dongitan*. Sebelum memeluk agama Islam, orang Bobongko memburu dan mengkonsumsi *dongitan* ini sebagai sumber kebutuhan nutrisi. Kini, *dongitan* tak pernah ditangkap oleh penduduk untuk dikonsumsi atau diperdagangkan karena sejauh ini belum ada orang di kepulauan Togean yang membeli daging *dongitan*. Perburuan *dongitan* oleh penduduk hanya dilakukan jika hewan ini masuk atau mengganggu tanaman di kebun mereka. Sebagian ada yang membunuhnya dengan tombak atau perangkat jerat tali kaki, namun biasanya *dongitan* hanya diusir sejauh mungkin dari kebun hingga masuk kembali ke dalam hutan. *Dongitan* yang terbunuh dilemparkan begitu saja ke dalam atau tepi hutan, sejauh mungkin dari kebun (Sundjaya 2006:27).

Sebuah penelitian oleh M. Indrawan dan kawan-kawan berhasil ‘menemukan’ spesies burung hantu endemik kepulauan Togean, yaitu *Ninox burhani*. Kata ‘burhani’ dibelakang nama spesies tersebut sengaja diambil Indrawan dari nama seorang penduduk desa Benteng yang menjadi asisten lapangan dalam penelitiannya. Penduduk di desa Benteng sesungguhnya sejak

¹ Untuk uraian yang lebih jelas lihat Celia Lowe (2006) yang secara khusus, membahas soal peran beberapa LSM dalam program konservasi alam serta bagaimana relasi sosial yang terbangun di antara mereka dengan masyarakat Togean.

lama telah mengenal jenis burung tersebut dengan sebutan *kokolo'o*, sebutan untuk semua jenis burung hantu. Namun mereka mengaku bahwa jenis *kokolo'o* yang dianggap endemik tersebut jarang sekali mereka jumpai karena selalu hidup di dalam hutan yang jauh dari pemukiman. Pada bulan Maret 2008 lalu, satu jenis burung lain di kepulauan Togean, yaitu 'burung kaca mata' (*Zosterops somadikartai*) juga diresmikan secara ilmiah sebagai spesies endemik. Sebelum penemuan ini diumumkan di Indonesia, keberadaan burung ini telah lebih dulu dimuat dalam jurnal ornitologi terkenal di AS, yaitu *Wilson Journal of Ornithology* edisi Maret 2008. Dua jenis burung endemik inilah kemudian yang menjadikan kepulauan Togean sebagai salah satu dari 24 Endangered Bird Areas (EBA) di Indonesia (Kompas. 15 Maret 2008).²

Perairan laut kepulauan Togean, termasuk wilayah pesisirnya yang berupa hutan mangrove, juga telah menjadi perhatian para peneliti dari Indonesia dan negara lain. Hasil survey *Marine Rapid Assessment Program* (MRAP) oleh Conservation International Indonesia (CII) tahun 1998 menunjukkan bahwa kepulauan Togean merupakan salah satu bagian ekosistem terumbu karang penting di dunia, atau *The World's Coral Triangle*, sebuah kawasan yang meliputi wilayah-wilayah perairan Jepang, Philipina, Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, Australia, hingga negara-negara kepulauan di Pasific. Para ahli biologi menyatakan bahwa kepulauan Togean memiliki seluruh tipe terumbu karang yang ada di dunia, yaitu karang tepi (*fringing reef*), karang penghalang (*barrier reef*), karang tumpuk (*patch reef*), dan karang cincin (*atoll*). Survey MRAP juga menemukan 262 spesies karang yang tergolong ke dalam 19 famili di Kepulauan Togean, termasuk jenis karang endemik Togean, yaitu *Acropora togeanensis*. Adapun jenis ikan terumbu karang yang tercatat adalah 596 species ikan yang termasuk dalam 62 family, termasuk jenis *Paracheilinus togeanensis* dan *Ecsenius sp* yang diduga kuat merupakan endemik Togean. Selain itu juga ditemukan 555 spesies moluska dari 103 famili, 336 jenis Gastropoda, 211 jenis

² EBA adalah kategori yang dibuat oleh Birdlife Internasional, sebuah lembaga konservasi burung di dunia. Suatu tempat atau lokasi ditetapkan sebagai EBA karena sedikitnya terdapat dua spesies burung endemik yang ada di tempat tersebut. Di Indonesia, telah ada 24 daerah yang dinyatakan sebagai EBA. *Kokolo'o* (*Ninox burhani*) dan 'burung kaca mata' telah menjadi bagian dari sekitar 1.598 jenis burung endemik di Indonesia ("Daerah Endemik Burung Bertambah", *Kompas*, 15 Maret 2008).

Bivalvia, 2 jenis Cephalopoda, 2 jenis Scaphopoda dan 4 jenis Chiton (Allen and McKenna 2001).

Penelitian oleh CII dan Yayasan Pijak telah mengidentifikasi sekitar 33 spesies mangrove di kepulauan Togean, terdiri dari 19 spesies mangrove sejati (*true mangrove*) dan 14 spesies mangrove ikutan (*associate mangrove*). Seluruh jenis mangrove ini dikelompokkan dalam 26 genus dan 21 familia. Hutan mangrove kepulauan Togean juga merupakan habitat bagi sedikitnya 50 spesies hewan. Selain melakukan klasifikasi secara biologis terhadap jenis-jenis mangrove, penelitian ini juga menghimpun informasi tentang nama-nama jenis mangrove berdasarkan pengetahuan penduduk kepulauan Togean, termasuk kegunaannya bagi mereka (Adhiasto dan Al Hasni 2001).

Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kepulauan Togean, sebelum penunjukan taman nasional, pemerintah membuat pembagian kawasan hutan di kepulauan Togean berdasarkan fungsi dan pemanfaatannya yang ditetapkan dalam berbagai peraturan negara, yaitu Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HK), serta hutan Areal Penggunaan Lain (APL).³ RDTR tersebut juga dilengkapi dengan peta batas dari tiap hutan yang dimaksud. Meski pada kenyataannya banyak wilayah-wilayah yang dianggap sebagai hutan berdasarkan keputusan pemerintah tersebut telah berubah menjadi kebun-kebun milik penduduk, namun pemerintah tetap menganggapnya sebagai hutan. Bagi pemerintah, seluruh wilayah yang dalam peta penunjukkan dianggap sebagai hutan harus tetap menjadi hutan sejauh tidak ada ijin atau peraturan yang mengubahnya. Ketika apa yang ditetapkan sebagai 'hutan' tersebut telah menjadi kebun tanaman kelapa, cengkeh atau cokelat (*cacao*), maka perlu dilakukan praktek penghutanan kembali. Alasan inilah yang salah satunya melahirkan proyek-proyek rehabilitasi lahan, reboisasi, atau sejenisnya.

³ Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 136/1028/Bappeda tahun 1996. Surat itu diperkuat dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 yang menetapkan kawasan hutan di Sulawesi Tengah seluas 4.394.932 hektar, termasuk di dalamnya hutan di kepulauan Togean seluas 74.600 hektar. Ketika sebuah wilayah dikategorikan pemerintah sebagai 'hutan', maka secara normatif struktur dan organisasi bagi penguasaan dan pemanfaatannya harus mengacu kepada segala bentuk aturan yang dikeluarkan negara, terutama UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

2.3. Alam Togeana bagi Penduduk

Peneliti biologi, LSM konservasi alam, serta pemerintah telah menggunakan kriteria yang berbeda untuk memberi identitas terhadap alam kepulauan Togeana. Dengan perspektif yang berbeda, masyarakat setempat juga membuat pembagian hutan menjadi *pangale* dan *iyopo*. *Pangale* adalah hutan di mana pohon-pohon kayu di dalamnya belum pernah ditebang atau dibuka untuk keperluan apa pun. Adapun *iyopo* merupakan hutan yang sebagian atau seluruh wilayahnya telah ditumbuhi kembali dengan pohon-pohon kayu setelah mengalami penebangan, seperti untuk membuat perahu, pembuatan bangunan atau pembukaan kebun. Dilihat dari usia jenis pohon kayu yang tumbuh, penduduk membuat kategori *iyopo ntua* atau *iyopo tua* untuk hutan yang batang-batang pohon-pohon kayunya dianggap sudah cukup besar dan tinggi, hampir mendekati kondisi *pangale*. Sedangkan *iyopo* yang mulai ditumbuhi tanaman-tanaman perintis, atau pohon-pohon kayunya mulai tumbuh besar, dinamakan *iyopo ngura* atau hutan muda. Dalam terminologi ilmu kehutanan, pengertian *pangale* lebih mendekati konsep hutan primer sedangkan *iyopo* menyerupai hutan sekunder. Lokasi-lokasi hutan bekas area penebangan kayu oleh perusahaan pemegang HPH dan IPK, yang telah ditumbuhi oleh pohon-pohon baru, oleh penduduk juga dianggap sebagai *iyopo*, baik *ngura* maupun *ntua*.

Iyopo ngura maupun *ntua*, adalah hutan dalam penguasaan petani yang pertama membuka *pangale* maupun mereka yang telah mendapatkan haknya atas hutan tersebut, misalnya melalui jual beli atau warisan. Kebun, masyarakat di kepulauan Togeana menyebutnya *kebong*, *ngovu* atau *inaut*, dibuka dengan teknik tebas bakar, atau *maras* dalam bahasa mereka. Pembukaan kebun kebanyakan dilakukan pada *iyopo*, yang dibersihkan dengan cara menebang pohon-pohon yang tumbuh. Lahan yang telah terbuka kemudian dibakar dan dibiarkan satu hingga dua bulan sebelum ditanami tanaman pangan, seperti palawija, ketela, dan padi. Mengingat kondisi tanah di kepulauan Togeana yang tipis dan berbatu, penanaman padi atau jenis tanaman lainnya secara terus menerus hanya dapat dilakukan sekitar 2 hingga 3 tahun masa produksi. Setelah itu, petani menganggap tanah sudah kurang subur untuk jenis-jenis tanaman tersebut. Oleh karenanya kebun kemudian ditanami tanaman keras seperti cokelat, kelapa atau cengkeh. Itu

pun sejauh petani memiliki kemampuan untuk membeli bibit. Namun, jika petani belum mau atau mampu menanam tanaman keras, petani membiarkan kebun-kebun yang kurang subur tersebut hingga dipenuhi alang-alang dan belukar sampai akhirnya ditumbuhi pohon-pohon kayu menjadi *iyopo ngura*.

Pembukaan *pangale* untuk kebun-kebun baru sangat jarang terjadi belakangan ini karena petani membutuhkan biaya cukup besar untuk *baparas* (menebang kayu dan membersihkan lahan). Mereka bisa saja melakukan penebangan sendiri dengan gergaji tangan atau kapak, namun hal ini sudah hampir tak pernah dilakukan karena membutuhkan tenaga dan waktu cukup lama. Petani harus tetap memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sementara mereka melakukan pembukaan hutan. Cara yang paling cepat adalah dengan menggunakan gergaji mesin, penduduk kepulauan Togeang menyebutnya dengan 'sensor' yang berasal dari kata *chainsaw*. Bagi petani yang memiliki sensor, mereka masih harus mengeluarkan biaya untuk bahan bakar bensin juga upah beberapa orang yang membantunya. Sedangkan yang tidak memiliki sensor harus membayar sewa mesin dan upah kerja operator (tukang) sensor yang dihitung berdasarkan hari kerja atau jumlah pohon yang ditebang. Semua biaya tersebut belum termasuk pembelian bibit tanaman.

Pembukaan kebun secara rotasi dilakukan oleh petani yang pernah beberapa kali membuka *pangale*. Ketika kebun sudah mulai ditanami tanaman keras, atau dibiarkan menjadi *iyopo*, petani mencari lokasi lain untuk membuka kebun baru. Mereka yang menguasai *iyopo* bekas kebun sebelumnya, akan kembali ke lokasi tersebut. Bagi yang tidak punya *iyopo*, selama memiliki dana cukup, akan membuka *pangale* dengan meminta ijin dari kepala desa. Ada petani yang memiliki beberapa kebun yang telah menjadi *iyopo*. Sebelum memutuskan apakah satu lokasi *iyopo* sudah layak menjadi kebun, petani biasanya menyelidiki dahulu tingkat kesuburan tanahnya, yaitu dengan menancapkan sebilah *peda* (parang) ke tanah sedalam mungkin (biasanya sekitar 30-40 centimeter). *Peda* tersebut kemudian dicabut dan diamati. Semakin sedikit tanah yang menempel pada *peda*, maka lokasi tersebut dianggap subur dan *iyopo* layak di-*paras* untuk dijadikan kebun.

Selain sebagai penyedia lahan subur untuk berkebun, hutan juga menjadi sumber berbagai kebutuhan bagi masyarakat kepulauan Togeana. Pohon-pohon kayu jenis krikis, palapi (*Heritiera javanica*), kayu besi (*Intsia bijuga*), siuri (*Koordersiodendron pinnatum*), uru (*Elmerrillia ovalis*), cempaka (*Elmerrillia* sp.), adalah jenis pohon yang biasa dijadikan bahan bangunan dan pembuatan perahu.

Pohon-pohon aren (*Arenga pinnata*) banyak tumbuh di sekitar *pangale* maupun *iyopo*. Penduduk memanfaatkan aren dengan cara menyadap cairannya untuk diolah menjadi gula. Aktivitas pembuatan gula aren ini dilakukan langsung di lokasi-lokasi penyadapan. Selain aren, hasil hutan yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual adalah rotan (*Calamus unifarius*) dan madu. Beberapa jenis buah-buahan musiman juga ada yang diambil dari hutan, tapi kebanyakan tumbuh di dalam kebun-kebun mereka, seperti durian (*Durio zibethinus*), manggis (*Garcinia celebica*), pisang (*Musa* sp.), mangga (*Mangifera* sp.), cempedak (*Artocarpus integer*) dan langsung (*Lancium domesticum*).

Pohon sagu (*Metroxylon sago*) merupakan salah satu sumber makanan sehari-hari bagi penduduk kepulauan Togeana. Hutan-hutan sagu masih cukup mudah dijumpai di setiap pulau besar di kepulauan Togeana. Data terakhir yang tersedia dari kabupaten Poso memperkirakan luas hutan sagu di Kepulauan Togeana hingga tahun 2000 sekitar 134,62 hektar dengan produksi sagu sekitar 171,44 ton.

Pohon-pohon sagu di kepulauan Togeana tidak berada dalam penguasaan individual, melainkan secara kelompok, bisa berdasarkan pertalian keluarga, desa atau suku. Dalam masyarakat suku Bobongko, hutan-hutan sagu yang dikelola bersama ini disebut *gonggan pogaluman*. *Gonggan* berarti pula sekumpulan pohon (termasuk sagu), sedangkan *pogaluman* berarti kebersamaan, asal kata *mogalom* atau bersama. *Gonggan pogaluman* berarti pula sekumpulan pohon (hutan) sagu yang dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh beberapa orang Bobongko. Tiap kelompok Bobongko, baik yang tinggal di Teluk Kilat, Tumbulawa, maupun desa Baulu masing-masing memiliki satu atau lebih areal *gonggan pogaluman* yang dikelola secara terpisah. Di dalam wilayah Teluk Kilat misalnya terdapat tiga lokasi *gonggan pogaluman*, yaitu di daerah Titiri seluas 0,5 ha yang dimanfaatkan oleh orang-orang Bobongko yang tinggal di

Titiri atau yang memiliki ikatan kekerabatan dengan mereka, di Matobiyai sekitar 0,5 ha, dan di Pindangoya yang dimiliki oleh orang Bobongko di Lembanato yang luasnya sekitar 0,25 ha.

Gonggan pogaluman juga menerapkan aturan-aturan yang menentukan hak dan kewajiban orang Bobongko dalam dalam suatu kelompok dalam memanfaatkan pohon sagu. Semua orang Bobongko bisa mengambil (*bapukul*) sagu sejauh mereka mendapat ijin pemimpin kelompok atau orang yang ditunjuk untuk mengaturnya. Dalam satu pohon sagu, bisa dihasilkan antara 10 hingga 50 *tumang* tergantung volume batang pohon. *Tumang* atau *bancu* adalah wadah penyimpan tepung sagu berbentuk silinder berdiameter sekitar 30 cm dan panjang 75 cm yang terbuat dari kulit pelepah pohon sagu. Berapa pun jumlah *tumang* yang dihasilkan seseorang dari *bapukul*, harus diberikan sebagian kepada ketua kelompok atau petugas yang ditunjuk dengan perhitungan 1 berbanding 3, atau satu *tumang* untuk kelompok dan tiga *tumang* untuk orang yang *bapukul* sagu. Penduduk mengambil sagu untuk dijual pada orang-orang di kampung mereka atau saat hari pasar. Satu atau dua *bancu* mereka simpan untuk dikonsumsi bersama keluarga yang biasanya habis hingga satu atau dua bulan lamanya. Beberapa penduduk desa juga ada yang membeli sagu dalam jumlah cukup banyak untuk dijual kembali ke penampung-penampung di Ampana atau Gorontalo.

Sagu masih menjadi sumber pangan utama penduduk, meski pun beras jauh lebih disukai. Sebagian dari mereka menganggap memakan sagu hanya membuat perut kenyang beberapa saat saja, dibanding jika makan nasi. Kebanyakan rumah tangga mengkonsumsi sagu dan beras secara bergiliran. Pada tahun 2007, harga jual sagu berkisar antara Rp. 12.000,- per *bancu*. Sedangkan harga beras termurah di pasar atau warung sekitar Rp. 4.000 hingga Rp. 5.000,- per kilogram, kecuali beras yang dijual melalui program RASKIN yang harganya antara Rp. 1.300 hingga Rp. 1.500 per kg. Beberapa hasil masakan dari sagu antara lain *sinole*, *jeppa* (orang Bajo menyebutnya *papi*), dan *beko* yang dikonsumsi sebagai pengganti nasi dengan lauk ikan bakar dan *dabu-dabu* atau sambal cabai dan tomat yang dicampur minyak kelapa. Orang-orang Bajo selalu membawa satu atau dua *bancu* sagu sebagai bekal mereka selama melakukan

pongka, atau mencari hasil laut secara berkelompok di luar kampung untuk beberapa hari bahkan berminggu-minggu.

Berbagai jenis sumberdaya alam yang terdapat di laut dan hutan mangrove juga menjadi sumber-sumber ekonomi bagi penduduk di kepulauan. Berbagai jenis ikan, kerang, udang dan biota laut lainnya diambil penduduk sebagai komoditas perdagangan maupun untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Penangkapan hasil laut melibatkan pula penggunaan teknik penangkapan, mulai dari pancing, jala, rompong, bagang, panah, hingga penggunaan bahan peledak dan potasium sianida.

Perdagangan ikan karang hidup (*live reef fish trade*) untuk konsumsi terkait dengan permintaan pasar internasional terhadap ikan karang seperti kerapu dan ikan napoleon wrasse atau 'maming' (*Cheilinus undulatus*). Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak mengekspor ikan karang hidup ke beberapa negara, terutama Hongkong. Sepanjang tahun 1997-1998 ekspor ikan karang dari Indonesia menuju Hongkong mencapai 1.884 ton, lebih banyak dibanding ekspor dari Australia, Filipina, Solomon Island, dan Malaysia. Harga ikan napoleon di Hongkong bisa mencapai harga US\$ 54/kg, sedangkan jenis kerapu berkisar antara US\$ 15-US\$ 45/kg. Harga termahal adalah jenis kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*) yaitu sekitar US\$ 65/kg. Di Singapura, tahun 2003 lalu harga kerapu super (*Plectropomus sp*) di salah satu restoran bisa mencapai Sin\$ 800,- atau Rp. 400.000,-/kg (Cesar, *et.al.*, 2000). Secara ekonomi, ini menunjukkan bahwa kepulauan Togean menjadi salah satu bagian dalam mata rantai ekonomi internasional yang nilainya cukup tinggi.

Di Kepulauan Togean, pengusaha ikan hidup pertama kali masuk pada sekitar tahun 1992, yang jumlahnya terus bertambah hingga akhir tahun 90-an. Kini sedikitnya ada empat perusahaan perdagangan ikan hidup yang beroperasi di Kepulauan Togean. Masing-masing memiliki *camp* penampungan di Taningkola, Salaka, Pulau Angkayo, dan di Pulau Papan, Malenge. Mereka membeli ikan dari nelayan langsung atau melalui beberapa penampung lokal milik masyarakat yang ada di beberapa desa. Hasil survey CII dan CCIF tahun 2002 menghitung secara umum nilai ekonomi perdagangan ikan hidup di seluruh Togean mencapai nilai sekitar US\$ 977.000 atau setara dengan Rp. 7,8 miliar (CI-CCIF: 2003).

Umumnya penangkapan ikan karang dalam kondisi hidup ini dilakukan dengan cara pembusukan dengan menggunakan potasium sianida. Bahan kimia ini dijual dalam bentuk table atau cair yang oleh nelayan dapat diperoleh dari para penampung ikan.

Pada masa awal perkembangannya, seorang pengusaha ikan hidup di Kepulauan Togean bisa menampung sekitar 300 ekor ikan napoleon per bulan, bahkan dalam satu ekor bisa mencapai berat lebih dari 10 kg. Namun tahun 1998, mereka rata-rata hanya mampu menerima sekitar 100 ekor dari nelayan (Cannon: 1998). Tahun 2004, dalam wawancara dengan seorang staf CII, seorang penampung ikan hidup mengaku hanya menerima sebanyak 70 kg ikan napoleon dalam satu tahun, padahal sepanjang tahun 2002 lalu ia masih menerima sekitar 1 ton ikan dari nelayan, baik jenis kerapu dan maupun napoleon. Secara umum di tingkat regional, informasi statistik Kabupaten Poso 2000 menyebutkan bahwa nilai ekspor produk ikan hidup dan ikan beku di Kabupaten Poso mencapai 7.672 ton atau setara dengan US\$ 100.943,75. Ini turun sekitar 50% dari tahun 1999 yang mencapai 16.800 ton (BPS Poso: 2000).

Bagi ilmuwan di CII, angka penurunan tersebut menjadi hal yang penting dalam konservasi alam. Ini menunjukkan bahwa kualitas terumbu karang semakin menyusut akibat apa yang disebut dengan penangkapan berlebih (*overfishing*) dan perikanan destruktif (*destructive fishing*) seperti pemboman dan pembusukan ikan. Kedua teknik penangkapan ikan yang ‘destruktif’ ini selalu dianggap sebagai persoalan, baik oleh nelayan sendiri, pemerintah daerah, LSM, dan para pengusaha yang sangat bergantung pada terumbu karang dan kondisi air laut.

Selain jenis-jenis ikan karang yang dijual dalam kondisi hidup. Nelayan di kepulauan Togean juga menjual ikan-ikan karang dalam kondisi beku untuk perdagangan lokal di Ampana dan sekitarnya. Ikan-ikan tersebut untuk kebutuhan rumah makan yang menjual ikan bakar. Ikan-ikan dalam kondisi mati juga kadang dibuat sebagai ikan garam atau ikan asin yang perdagangannya bisa mencapai wilayah Gorontalo dan Banggai. Beberapa jenis ikan garam, seperti lolosi, sangat bergantung pula pada pasokan dari nelayan yang melakukan pemboman ikan. Oleh karena itu, ketika CII dan CCIF melakukan penelitian ekonomi terhadap perdagangan ikan garam, tim peneliti menganggap program konservasi untuk

menghentikan pemboman dan pembiusan juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi bagi nelayan dan juga jaringan perdagangan ikan garam di daerah lain. Hal ini juga akan membawa akibat terhadap kehidupan sosial mereka.

Bentuk pemanfaatan sumberdaya alam laut lainnya di kepulauan Togeang adalah penangkapan teripang, ikan teri, kepiting dan berbagai jenis udang. Khusus teripang, penangkapannya dilakukan dengan *balobe* yang dilakukan pada malam hari dengan penerangan lampu pompa (*petromax*). Kegiatan ini banyak dilakukan oleh nelayan Bajo karena mereka memiliki kemampuan menyelam (*bamudung*) tanpa alat. Di saat *balobe* teripang, tak jarang nelayan juga mengambil jenis lain seperti udang atau kepiting.

Ikan teri, atau ligo, ditangkap dengan menggunakan bagang apung. Sejenis kolam dari kayu yang ditopang dua perahu dan dilengkapi jaring (*lirang*). Kegiatan ini dilakukan malam hari pada malam 'gelap' atau tak ada bulan. Orang Bobongko di teluk Kilat menyebut masa penangkapan ikan teri ini dengan istilah *turoh*. Mereka menggunakan lampu petromaks untuk memancing teri berkumpul di bawah bagang. Ketika jumlah teri dianggap cukup banyak, maka nelayan segera menggulung *lirang* hingga seluruh teri terangkat. Aktivitas menangkap teri (*babagang*) banyak dilakukan oleh nelayan di Wakai, Teluk Kilat, dan Bangkagi. Jumlah nelayan yang menggunakan bagang memang tak banyak karena peralatan ini membutuhkan biaya hingga jutaan rupiah. Ikan teri terutama dijual pada para penampung yang berasal dari Gorontalo.

2.4. Orang-orang 'Pulo'

2.4.1. Alam dan Identitas Sosial

Laporan sensus demografi yang dikeluarkan kabupaten Touna menyebutkan bahwa pada tahun 2006 jumlah penduduk di empat kecamatan di kepulauan Togeang kurang lebih 32.000 jiwa. Mereka tinggal menyebar di 42 desa yang ada dalam empat wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Una una yang meliputi penduduk di pulau Batudaka dan pulau Una una; kecamatan Togeang yang meliputi pulau Togeang dan beberapa pulau kecil di sekitarnya; kecamatan Walea Kepulauan yang mencakup pulau Talatakoh, Malenge dan pulau Walea Kodi; serta kecamatan Walea Besar.

Sebagaimana umumnya informasi-informasi demografis, laporan statistik pemerintah Indonesia juga membagi identitas penduduk di kepulauan Togeian berdasarkan jenis pekerjaan mereka, yaitu petani, nelayan atau pekerjaan lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten tahun 2004, di kepulauan Togeian terdapat sekitar 1.760 kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan dengan produksi hasil perikanan laut sebesar 523 ton. Sedangkan berdasarkan Kecamatan Dalam Angka yang dikeluarkan Pemda Poso tahun 2000 menunjukkan jumlah petani (tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura) di kepulauan Togeian sekitar 2.231 kepala keluarga.

Meski demikian, di kepulauan Togeian sesungguhnya sulit menunjukkan batasan yang tegas apakah seseorang adalah 'petani' atau 'nelayan' karena dalam kesehariannya penduduk bisa hampir selalu mencari hasil laut meski mereka juga memiliki kebun cengkeh, cokelat atau kelapa. Atau, mereka tampak selalu mengurus kebunnya, namun juga memiliki bagang, atau mencari hasil laut pada waktu-waktu tertentu.

Bahkan, tulisan-tulisan yang dibuat oleh pemerintah, LSM, atau peneliti kerap membagi identitas-identitas etnik ke dalam aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam (Darnaedi, 1996). Padahal, di kepulauan Togeian, mencari hasil laut dengan cara memancing, menjaring, memanah, atau menggunakan alat tangkap lainnya dilakukan hampir semua kelompok etnik yang ada di hampir semua desa. Pengecualian bisa digunakan bagi mereka yang tinggal jauh dari pantai, seperti desa Danda, Langger, Molowagu dan Beko, di mana pantai masih harus ditempuh dengan berjalan kaki hingga beberapa kilometer dari rumah mereka. Sebagian penduduk desa yang berasal dari suku Bajo, seperti Kabalutan, Pulau Anam, atau Kulinkinari, juga memiliki kebun-kebun coklat atau kelapa, serta mengambil hasil-hasil hutan. Keterkaitan mereka dengan tanah dan aktivitas berkebun hampir tidak dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka yang sesungguhnya.

Membuat dikotomi antara petani dan nelayan secara ketat, terutama dalam laporan-laporan demografi oleh pemerintah, merupakan proses pembentukan identitas sosial yang terlalu ekonomis. Nelayan atau petani dianggap sebagai profesi, sebuah manifestasi dari pemahaman bahwa memanfaatkan sumberdaya

alam hanya berada pada domain ekonomi, sebagai tindakan yang semata-mata melibatkan kepentingan-kepentingan pemenuhan kebutuhan material mereka. Saya melihat intensitas seseorang memanfaatkan hasil laut maupun mengolah kebun lebih merupakan kemampuan-kemampuan seseorang dalam mengakses sumberdaya yang tersedia, baik berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan modal material. Seorang Bajo tidak memutuskan menjadi nelayan atau pencari hasil laut karena pertimbangan etnik yang disadarinya. Demikian pula halnya dengan orang-orang Bobongko. Mereka tidak memilih untuk menjadi petani karena 'loyalitasnya' sebagai orang Bobongko, atau karena leluhur mereka hidup dari mengolah hasil kebun.

Sepanjang saya berada di kepulauan Togeon, di desa Kabalutan terlihat adanya perbedaan dari tahun ke tahun, di mana semakin banyak penduduk yang memiliki kebun. Mereka selama ini dikenal sebagai suku Bajo, 'orang laut', atau suku yang memiliki kebudayaan yang terikat kuat dengan sumberdaya alam laut. Puah Kepala membenarkan bahwa orang-orang Kabalutan semakin banyak yang meminta izin padanya untuk membuka hutan untuk berkebun. Puah Kepala sendiri memiliki sekitar 2 hektar kebun yang telah ditanami coklat. Di belakang rumahnya terlihat sebuah alat semprot pestisida yang digunakan untuk menyiram air pada tanaman coklatnya. Puah Sahid, salah seorang pelaku pemboman ikan yang cukup dikenal di Kabalutan, bercerita: "Biar gimana, uang dari *babom* saya simpan simpan sedikit, beli kebun coklat buat anak-anak nanti so besar, buat saya kalau so tidak sanggup *babom* lagi". Pada tahun 2002, ketika harga cengkeh mencapai Rp.90.000 per kilogram, banyak petani yang mengganti tanaman coklat dengan cengkeh. Saat itu, orang-orang Bajo di Kabalutan juga lebih banyak yang membuka kebun mereka untuk menanam cengkeh. Saya melihat saat itu beberapa bibit cengkeh dalam *polibag* warna hitam berjejer di sisi-sisi rumah mereka.

Pengelompokan identitas berdasarkan pekerjaan atau aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam semakin menjauh dari aspek-aspek sosial kulturalnya manakala profesi seseorang dikelompokkan lagi ke dalam: 'pekerjaan utama' dan 'pekerjaan sampingan'. Lembar sensus yang diberikan oleh pemerintah untuk diisi oleh kepala-kepala desa sebagai Data Potensi Desa menuntut proses pengambilan keputusan bagi penduduk desa maupun petugas

yang mengisi lembar sensus tersebut. Seorang yang memiliki kebun, memiliki bagang untuk menangkap teri, dan kadang pergi mengail ikan-ikan karang, harus membuat keputusan apakah pekerjaannya adalah petani atau nelayan. Jika petani menjadi pilihan, maka nelayan adalah sebuah pekerjaan sampingan.

Kategorisasi identitas seperti di atas bukannya tak memberi efek terhadap relasi sosial orang-orang di kepulauan Togean dalam berbagai konteks pelaksanaan proyek-proyek yang dijalankan pemerintah maupun LSM. Lowe menemukan adanya situasi di mana seorang penduduk desa seakan harus memilih apakah ia akan menjadi ‘petani’ atau ‘nelayan’ ketika bantuan peningkatan ekonomi desa diturunkan, sebagaimana ia tuturkan:

Within these bureaucratic articulation identities such as “nomad”, “farmer” or “fisher” were proposed as fixed and distinct social spaces. In Susunang, Puah Kepala told me that the village had been invited to participate in an American foreign aid project called “Agricultral-based Area Development”. This was “foreign aid worked out between the presidents and ministers of the two countries,” he said. The project would give \$20,000 to each Togean village, but there would have to be a “regulation” (*peraturan*) to it: all people would be grouped according to whether they were “fishers” or “farmers”. No one was allowed to be both a fisher and a farmer, and, after the process of classification was established, no one would be allowed to switch categories. Susunang people understood very well that “farmer” was a more valued social identity than “fisher”, and they often claimed to me proudly that their children would only farm when they grew up (Lowe 2006:92).

Apa yang Lowe temukan di desa Susunang tersebut juga saya temukan di desa-desa lainnya, di mana proyek-proyek pembangunan desa seperti Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Inpres Desa Tertinggal (IDT), atau Sulawesi Area Agriculture Development Project (SAADP), dan proyek bantuan lainnya yang disalurkan oleh dinas-dinas di kabupaten dan propinsi. Tidak hanya itu, pada bagian berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana identitas yang dibentuk berdasarkan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam ini berpengaruh terhadap akses seseorang terhadap sumberdaya alam, sebagaimana terjadi pada orang-orang Kabalutan yang memanfaatkan sumberdaya hutan.

2.4.2. Identitas dalam Sejarah

Pada tahun 2001, saya menemani seorang staf program kampanye konservasi alam dilakukan RARE dan CII, dua LSM internasional yang berkantor pusat di AS, membagikan sebuah poster yang memuat tulisan: *Lestari Alamku*,

Jaya Togeanku. Tak ada masalah bagi penduduk saat poster-poster itu dibagikan di wilayah Batudaka, pulau Togeanku, Talatakoh dan Malenge. Namun, kalimat yang tertulis dalam poster tersebut ternyata mendapat protes dari beberapa orang yang tinggal di kecamatan Walea Kepulauan. Mereka menilai, program dan kalimat tersebut hanya ditujukan bagi orang-orang Togeanku, bukan bagi penduduk yang tinggal di pulau Walea Kodi dan Walea Bahi. Bagi orang Walea, kata 'Togeanku' yang tertulis dalam poster tersebut secara spesifik hanya mengacu pada nama pulau Togeanku atau orang suku Togeanku yang kebanyakan mendiami pulau tersebut dan Batudaka. Sedangkan mayoritas penduduk di Walea adalah suku Saluan dan sebagian lagi adalah keturunan Gorontalo. Penyebar poster LSM yang menerima protes tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata 'Togeanku' dalam poster tersebut adalah wilayah Kepulauan Togeanku, nama yang selama ini tercantum dalam peta atau karya-karya tekstual yang dibuat pemerintah, para peneliti, LSM, atau media massa. Meski penduduk Walea pada akhirnya menerima penjelasan tersebut, hal ini menunjukkan bagaimana orang Walea Kepulauan membangun identitas mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Ada pemaknaan yang berbeda tentang 'Togeanku' antara orang-orang di Walea Kepulauan dengan orang luar, bahkan di antara penduduk kepulauan Togeanku sendiri.

Persoalan nama atau penamaan terhadap kepulauan Togeanku ini di satu sisi merupakan sebuah proses identifikasi, yang mengambil dua bentuk, yaitu: sebagai dinamika individual yang bersifat unik berdasarkan karakteristik seseorang, serta sebagai bentuk manifestasi budaya yang bersifat kolektif (Hall, 1989: 232). Dalam arti, proses identifikasi sangat ditentukan oleh relasi sosial seseorang dengan orang lain. Akan tetapi, relasi itu sendiri juga ditentukan oleh struktur, peran, norma sosial yang dipahami secara kolektif di dalam komunitas di mana individu berada.

Namun, memandang nama dan penamaan kepulauan Togeanku seperti itu ternyata tak mampu memberi pemahaman lebih dalam bagi saya saat proses identifikasi yang menggunakan kata 'Togeanku' terjadi pula pada sebuah relasi sosial di mana tujuan (*intention*) atau kepentingan masing-masing aktor diperjuangkan melalui praktek kekuasaan. Sebuah 'nama' atau proses 'penamaan'

pada seseorang atau tempat juga bisa bersifat politis, terutama pada kasus-kasus di mana makna dari sebuah nama, terutama yang dianggap tidak menyenangkan secara historis (*injurious name*), terkait dengan kontestasi kekuasaan antara satu kelompok sosial dengan kelompok lainnya (vom Bruck dan Bodenhorn, 2006:11-13).

Dalam konteks yang berbeda, nama ‘Togean’ juga dapat ditarik ke dalam sebuah perdebatan sejarah. Seorang suku Togean di Wakai, yang juga pengurus Aliansi Masyarakat Adat Kepulauan Togean (AMAT), menuliskan:

Kata Togean adalah kata yang diberikan oleh Penjajah Belanda untuk menyebut nama Kerajaan Lebo Kintanah Togo Eang, karena memang orang Belanda agak kesulitan membahasakan Togo Eang, yang kemudian disebut dengan sebutan dialek Belanda ‘Togean’. Namun sebenarnya dalam sejarah tidak mengenal kata Togean melainkan Togo eang atau Kerajaan Lebo Kintanah Togo Eang yang secara etimologi dalam bahasa daerah berarti Kerajaan Lembah (daratan) tiga orang besar. Namun sejalan dengan perkembangan sejarah, Belanda lebih mempopulerkan nama Togean dari pada Lebo Kintanah Togo Eang. Hal ini dapat ditelusuri dalam berbagai arsip administrative Pemerintah Belanda, seolah-olah sebutan resmi yang diakui oleh Belanda adalah Togean. Didasari atau tidak, dikaji dari istilah tersebut pemerintah Belanda telah memberi kontribusi terhadap pengaburan sejarah. Karena kata Togean yang telah populer hingga saat ini tidak lagi mencerminkan makna serta pengertian substansi yang jelas. Bahkan belakangan ini, terjadi lagi perdebatan perbedaan huruf “i” dan “e” (Togian atau Togean). Sekalipun kata Togean memiliki landasan bukti yang kuat, namun harus diakui perdebatan itu adalah perdebatan semu yang membenarkan pengaburan sejarah oleh Belanda dan tidak sedikitpun membantu untuk mengembalikan sejarah. Hendaknya yang diperdebatkan adalah pengembalian nama “Togo Eang” dari Togean.⁴

Seperti protes penduduk Walea Kepulauan atau perdatap dari Kani tadi, kata ‘Togean’ memang kadang menjadi perdebatan bagi beberapa orang di kepulauan Togean. Penduduk kadang memaknai kata ‘Togean’ sebagai nama salah satu pulau atau suku yang mendiami kepulauan ini. Dalam keseharian

⁴ Dikutip sesuai aslinya dari Amir Hi. Kani, “Realisasi Kecamatan Togean, Jangan Lupakan Sejarah”, dalam harian *Nuansa Pos*, edisi 17 Juli 2002. Artikel ini merupakan bagian dari sikap Kani terhadap perdebatan soal penetapan ibukota kecamatan Togean, kecamatan baru hasil pemekaran kecamatan Una una. Wilayah kecamatan Togean meliputi seluruh desa yang ada di pulau Togean, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Tongkabo, Pulau Anam, Tangkian, Monding, Panabali, dan Pangempa. Saat tulisan Kani ini dimuat, pemerintah berencana menetapkan desa Lebiti sebagai ibukota kecamatan Togean karena pertimbangan fasilitas fisik yang lebih lengkap dan lokasinya yang lebih datar dan luas. Bagian akhir tulisan ini merekomendasikan desa Benteng sebagai kota kecamatan Togean karena pertimbangan historis. Satu bulan sebelum tulisan itu dimuat, Kani bersama Udin Latif dan Naser Uka (ketiganya adalah pengurus AMAT) telah lebih dulu menulis artikel yang mengangkat keunggulan desa Benteng sehingga layak menjadi kota kecamatan Togean (“Keunggulan Desa Benteng, Menanggapi Opini Penentuan Ibukota Kecamatan Togean”. *Nuansa Pos*, 1 Juni 2002). Meski demikian, pemerintah daerah pada akhirnya tetap bertahan dan menetapkan Lebiti sebagai ibukota kecamatan Togean.

penduduk lebih sering mengidentifikasi diri mereka sebagai ‘orang pulo’ atau sebutan lain berdasarkan nama desa maupun kecamatan, misalnya orang Walea (Kepulauan), orang Una una, orang Wakai, orang Kabalutan dan sebagainya, bukan ‘orang kepulauan Togeian’ apalagi orang ‘Togeian’ untuk merujuk pada diri atau tempat tinggal mereka. Tapi dalam situasi tertentu, penamaan seperti itu digunakan juga apabila kata ‘kepulauan Togeian’ atau ‘Togeian’ dianggap relevan dalam interaksi sosial mereka, atau tergantung persepsi mereka terhadap lawan bicaranya.⁵

Saya tak bisa mengabaikan adanya dinamika dan keberlanjutan dari proses-proses membangun identitas sosial lewat konstruksi sejarah yang dilakukan untuk berbagai kepentingan. Sekelompok orang, baik dalam pengertian suku maupun desa, memiliki versi yang berbeda tentang sejarah atau asal-usul mereka di kepulauan Togeian. Sebuah buku sejarah lokal paling komprehensif tentang Tojo Una Una, di mana kepulauan Togeian termasuk di dalamnya, secara resmi telah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Touna lewat proyek dokumentasi sejarah yang dilakukan sebuah tim dari Universitas Tadulako, Palu.⁶ Buku ini menyebutkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan tuturan sejarah (lisan) di dalam masyarakat kepulauan Togeian disebabkan oleh faktor alam yang berbeda, letak geografis wilayah yang berjauhan dan perkembangan cerita yang bersifat kontinyu sehingga terjadi pembiasaan (Hasan, Nuraedah dan Lumangino, 2006:97). Bentang alam telah dianggap sebagai faktor determinan terhadap proses penuturan sejarah dan pembentukan pengetahuan yang berbeda-beda tentang sejarah masyarakat di kepulauan Togeian.

Seorang informan saya, yang juga anggota DPRD kabupaten Touna, ketika menghadiahkan buku sejarah Touna tersebut pada saya berkata bahwa buku tersebut pernah diseminarkan di Wakai. Beberapa orang kepulauan Togeian yang

⁵ Saya secara bergantian menggunakan kata ‘Togeian’ atau ‘kepulauan Togeian’ untuk merujuk pada tempat atau penduduk di wilayah kepulauan Togeian. Penggunaan kata ‘Togeian’ yang spesifik mengacu pada salah satu suku atau pulau yang ada di kepulauan ini saya beri tambahan kata ‘suku’ atau ‘pulau’ di depan kata Togeian tersebut.

⁶ Halaman-halaman pertama buku ini memuat kata-kata sambutan oleh Bupati Touna (yang lahir di desa Bomba, kepulauan Togeian), ketua DPRD Touna, dan Sekretaris DPRD Touna. Halaman buku ini juga mencantumkan 44 orang yang menjadi informan atau narasumber informasi sejarah yang dituliskan. Semuanya merupakan orang-orang yang dianggap menyimpan informasi sejarah, baik berdasarkan pengalaman langsung maupun memperolehnya dari sumber lain. Mereka tinggal di berbagai kota dan desa di wilayah Touna, 13 orang di antaranya penduduk kepulauan Togeian.

hadir sempat menyampaikan protes terhadap beberapa bagian buku tersebut, terutama terkait dengan sejarah suku-suku yang ada di kepulauan Togean, seperti Bajo, Saluan, Bobongko, dan suku Togean. Informan mengatakan pada saya: “Coba mas Jaya baca baik-baik, tolong dikoreksi data-data sejarah yang mungkin kurang sesuai dengan data yang *mas* peroleh dari masyarakat. Mas Jaya cukup lama tinggal di pulo [kepulauan Togean], mungkin ada cerita-cerita masyarakat yang tidak cocok dengan apa yang ditulis dalam buku ini”. Ketika itu saya hanya bisa mengatakan bahwa saya bukan ahli sejarah dan tidak punya keahlian melakukan penelitian sejarah. Lagi pula saya merasa tidak punya hak dalam menentukan sejarah mana yang benar, dan mana yang salah.

Hal yang penting bagi saya adalah mengetahui bagaimana perbedaan tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial antara masing-masing orang yang memiliki versi cerita tersebut. Bagaimana mereka menyikapi perbedaan tersebut satu sama lain, serta sejauh mana sejarah yang mereka bangun dan perbedaannya dengan versi lain mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Informan saya ini pada akhirnya mengakui bahwa pembuatan buku sejarah tersebut adalah ‘proyek pemda’, bagi saya ini juga menjadi sebuah ‘proyek politik’ bagi beberapa aktor yang memiliki akses terhadap sumber-sumber kekuasaan dalam sistem politik Touna saat ini. Tapi, terlepas dari ucapan penolakan saya terhadap permintaan informan tadi, saya merasa perlu mempelajari beberapa catatan tentang sejarah atau asal-usul masyarakat di kepulauan Togean. Hal ini mengingatkan tuturan sejarah seringkali menjadi sebuah wacana (*discourse*) yang cukup memiliki kekuatan dalam proses pembentukan identitas seseorang atau kelompok tertentu di kepulauan Togean.

Perbedaan kisah sejarah (lisan) antara satu suku dengan suku lainnya memang terjadi di kepulauan Togean, setidaknya yang cukup menonjol adalah antara suku Bobongko dengan suku Togean yang masih memperdebatkan siapa di antara mereka yang lebih dulu ada di kepulauan Togean, sehingga mereka dapat ditarik batas dengan jelas antara siapa yang patut dianggap sebagai suku ‘asli’ dan siapa ‘pendatang’. Seorang dari salah satu suku tersebut pernah menyatakan pada saya bahwa sejarah yang disebarkan oleh orang dari suku lainnya adalah ‘tidak

benar' dan penuh rekayasa. Demikian pula sebaliknya diutarakan oleh orang dari suku lain tentang sukunya.

Tulisan-tulisan tentang identitas etnik di kepulauan Togeian juga cenderung mengarahkan pada penilaian tentang siapa yang lebih dulu mendiami kepulauan ini. Sebuah makalah, berdasarkan 'cerita rakyat' yang dikumpulkan, secara meyakinkan menyebut suku Bobongko dan Bajo sebagai suku tertua dan yang pertama kali mendiami kepulauan Togeian (Darnaedi, 1996). Sumber lain menyebutkan bahwa suku Togeian yang mendiami desa Benteng adalah penduduk pertama yang ada di kepulauan Togeian (Hasan, dkk., 2006; Kani, 2002).

Di sisi lain, sebuah laporan perjalanan yang ditulis oleh van der Wal yang mengunjungi kepulauan Togeian tahun 1680-an menyebutkan bahwa ia telah bertemu dengan orang-orang Bobongko yang mendiami teluk Kilat bagian selatan pulau Togeian. Sementara tahun 1865, hampir dua ratus tahun setelah van der Wal, penguasa Gorontalo, C.B.H. von Rosenburg, menuliskan keberadaan orang-orang Bugis atau Sama (Bajo) di kaki gunung Benteng. Menurutnya, orang-orang Bugis ini yang telah memukul mundur orang-orang Bobongko, yang disebutnya sebagai 'penduduk asli' hingga jauh ke dalam hutan di pulau Togeian (dalam Lowe, 2006: 88-89).

Catatan lain tentang keberadaan suku-suku di kepulauan Togeian juga pernah ditulis oleh seorang peneliti linguistik asal Belanda, N. Adriani, yang pada tahun 1899 menulis *The Language of the Togeian Islands*. Adriani sudah menyebutkan keberadaan orang-orang suku Bobongko, Saluan dan Togeian. Dengan meneliti akar bahasa dari tiap suku, Adriani menarik asumsi-asumsi tentang kemungkinan asal-usul dari suku-suku tersebut. Dikatakan pula bahwa bahasa Bobongko memiliki akar dari bahasa Limbotto (kini masuk wilayah propinsi Gorontalo), sehingga kemungkinan besar mereka adalah keturunan orang-orang Limbotto yang bermigrasi ke kepulauan Togeian pada tahun 1800-an. Adriani juga menuliskan bahwa bahasa suku Togeian menyerupai bahasa yang digunakan penduduk di Ampana yang dikenal dengan bahasa Ta'a. Sedangkan bahasa Saluan lebih menyerupai bahasa yang digunakan di wilayah Luwuk, kini ibukota kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Lowe, 1999: 19-20).

Khusus soal migrasi orang-orang Limbotto seperti disebutkan Adriani, sebuah tulisan sejarah lokal oleh J. Bastiaans tentang perjanjian antara kerajaan Limbotto dan kerajaan Gorontalo, mungkin memberi pandangan yang berbeda tentang hubungan antara Bobongko dengan Limbotto. Salah satu isi perjanjian dua kerajaan tersebut mengatur pembagian kekuasaan atas beberapa wilayah di teluk Tomini. Disebutkan bahwa Sausu (sekarang masuk wilayah kabupaten Parigi Moutong) dan Tamalate masuk dalam wilayah kerajaan Gorontalo, sedangkan pulau Togeana dan Nyuala (Bastiaans tidak mengetahui letaknya) masuk ke dalam wilayah kekuasaan Limbotto (Bastiaans, 2005: 219).⁷

Penelitian saya ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah konstruksi sejarah yang pada akhirnya melahirkan sebuah ‘kebenaran’ bagi seseorang atau satu kelompok tertentu yang memiliki kepentingan atas sejarah tersebut. Saya hanya ingin meletakkan perbedaan-perbedaan dalam tuturan sejarah tentang orang-orang di kepulauan Togeana ini dalam konteks konstruksi identitas sosial mereka. Orang-orang dari suku Togeana, Bajo, Bobongko atau Saluan mungkin belum menemukan versi-versi lain yang lebih bervariasi tentang sejarah mereka, terutama yang ditulis orang luar. Akan tetapi, pengetahuan mereka tentang sejarah mereka sendiri pada situasi tertentu dapat menjadi bagian dalam mengartikulasikan identitas mereka, apalagi ketika hal itu memiliki relevansi untuk merespon sikap suku atau kelompok lain terhadap dirinya. Seorang

⁷ Bastiaans menulis soal perjanjian Limbotto dan Gorontalo ini sebagai ‘pelurusan’ atas penafsiran tulisan Padtbrugge, Gubernur Maluku untuk pemerintahan Hindia-Belanda, yang pada tahun 1677 melakukan pertemuan dengan ratu Limbotto dan raja Gorontalo. Dari pertemuan tersebut Padtbrugge menafsirkan bahwa kerajaan Gorontalo dan Limbotto sedang berseteru. Tahun 1933/1934, Bastiaans menemukan sebuah naskah perjanjian antara Limbotto dan Gorontalo yang ditulis di atas kulit terap (*fuiyu*) dengan tahun perjanjian 12 Sahban 1084, atau November 1673 Masehi. Bastiaans berkesimpulan bahwa Padtbrugge datang empat tahun setelah perjanjian tersebut dibuat dan tak mengetahui adanya perjanjian tersebut (Bastiaans, 2005:211). Ada hal yang menarik bagi saya tentang catatan Adriani, Bastiaans dan cerita beberapa orangtua Bobongko di Teluk Kilat. Adriani (dalam Lowe 1999) menduga migrasi orang Limbotto terjadi tahun 1880-an, sedangkan Bastiaans menyatakan perjanjian yang dibuat tahun 1673 itu, dua ratus tahun dari dugaan Adriani, telah menyebutkan pulau Togeana sebagai wilayah kekuasaan Limbotto. Disebutkan pula oleh Bastiaan, ratu Moliye dari Limbotto telah menyeberang ke pulau-pulau Togeana hingga Tanjung Api di Ampana (2005:hal. 220). Bastiaans juga menyebut tahun perjanjian berdasarkan kalender Islam, dan perjanjian dimulai kalimat ‘Bismillah’. Tetapi, sejarah lisan yang dituturkan orang Bobongko di teluk Kilat menyatakan bahwa pada masa penjajahan Belanda mereka belum mengenal agama, melainkan masih menganut kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau *alupuru*. Mesjid tertua dan pertama di teluk Kilat, terletak di dusun Popolion, baru didirikan pada tahun 1950-an. Darnaedi (1996) dan informan di Lembanato menyatakan bahwa hingga masa pemerintahan RI pun orang Bobongko masih memiliki tradisi memenggal kepala musuh (mengayau) untuk menunjukkan kebesaran suku mereka.

informan yang terpilih menjadi ketua sebuah organisasi pernah mengeluh bahwa posisi yang ia duduki mendapat protes dari anggota yang berasal dari suku lain. Ia dipandang sebagai suku minoritas dan bukan suku pertama yang mendiami kepulauan Togean sehingga ia dianggap tidak layak memimpin suku-suku lain yang jumlahnya mendominasi penduduk kepulauan Togean dan merupakan suku tertua. Informan tersebut menganggap orang yang protes dirinya sesungguhnya menginginkan posisi ketua organisasi tersebut karena dalam proses pemilihan ia kalah suara. “Padahal, dia itu keturunan Bugis, orangtuanya bukan asli sini [kepulauan Togean]”, kata informan ini.

Ratusan tahun lalu orang-orang Bugis, Gorontalo, Ternate, Cina dan bangsa Melayu telah datang ke kepulauan Togean dan melakukan transaksi-transaksi perdagangan hasil pertanian, hutan dan laut dengan para saudagar dan penduduk setempat. Orang-orang dari kerajaan Bugis, Ternate dan Gorontalo bahkan ikut berperan dalam membentuk struktur politik pemerintahan di kepulauan Togean dan sekitarnya yang kini menjadi kabupaten Touna (Kani 2002; Hasan, Nuraedah dan Lumangino, 2006). Kepulauan Togean telah menjadi bagian dari ‘kosmopolitik’ yang terbangun melalui sistem ekonomi kapitalisme global ketika itu. Banyak orang-orang yang kini memiliki posisi politik dan ekonomi di Touna adalah keturunan Bugis, Gorontalo atau Ternate.

Kopra-kopra dihasilkan dari pulau Una una telah lebih dari satu abad lalu menjadi komoditas penting dalam jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara, terutama sejalan dengan berkembangnya pelabuhan Makassar ketika itu. Teluk Tomini telah menjadi jalur lintasan kapal pengangkut kopra milik *Koninklijke Paketvaart Maatschapij* yang menghubungkan Makasar dengan pelabuhan besar lainnya, seperti: Gorontalo, Banggai, Ternate, dan Manado (Asba, 2007). Pulau Una una, pada jaman Hindia Belanda juga disebut sebagai pulau Ringgit karena menjadi salah satu pusat transaksi pedagang hasil perkebunan, hutan dan laut di kepulauan Togean dan sekitarnya (Kani, 2002). Hingga kini, kopra masih menjadi sumber penghasilan penduduk yang utama dan memberi nilai bagi perekonomian regional di kabupaten, selain coklat dan hasil laut. Kopra di kepulauan Togean juga memasok kebutuhan bagi daerah lain dan pasar internasional. Salah satu

pabrik pengolahan kopra milik perusahaan minyak goreng *Bimoli* pernah dibangun di kota Ampana.

Sumberdaya alam di kepulauan Togean, secara ekonomis, telah menarik kepentingan banyak suku dan bangsa untuk datang, menetap dan akhirnya membangun identitas sosial mereka di wilayah ini. Lalu, siapakah sesungguhnya yang disebut 'orang pulo' dalam konteks historis seperti ini?

